

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 21 ayat 1 dan 3 sangat begitu jelas bahwa hanya warga negara Indonesia saja dapat mempunyai hak milik. Untuk ayat ketiga sangat jelas bahwa Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015? 2) Bagaimana akibat Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Hak Penguasaan Tanah Dan Bangunan Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015?

Metode Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA, dimana WNI tersebut memperoleh asset berupa tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia *wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut* (pasal 21 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA). 2) Suatu perkawinan akan membawa akibat hukum kepada para pihak yang melakukannya antara lain terhadap hubungan suami dan istri, terhadap harta kekayaan, dan terhadap kedudukan anak, begitu pula halnya dengan perkawinan campuran. Adapun akibat hukum dari perkawinan campuran antara lain berkaitan dengan kewarganegaraan pasangan, kewarganegaraan anak, dan harta benda dalam perkawinan.

Kata kunci : Perlindungan hukum, hak penguasaan tanah, perkawinan beda kewarganegaraan

## ***ABSTRAC***

Law No. 5 of 1960 About the Agrarian, especially Article 21, paragraphs 1 and 3 really so clear that only citizens of Indonesia alone may have owned. For the third verse is very clear that the stranger who, after the enactment of this Act property rights for intestate inheritance or mixing property due to marriage, as well as Indonesian citizens who have the right to belong to and after the enactment of this law lost his citizenship shall relinquish that right in a period of one year from obtaining such rights or the loss of that citizenship.

The formulation of the problem in this research is: 1) How Legal Protection For Third Parties On Constitutional Rights Citizen In Tenure Land And Buildings Marriage Different Results Citizenship Following the Ruling of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015? 2) How is a result of Law For Third Parties On Constitutional Rights Citizen In Tenure Land And Buildings Marriage Different Results Citizenship Following the Ruling of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XIII / 2015?

Methods The research conducted in this thesis is a normative legal research. Normative legal research is conducted legal research by reviewing the materials that come from a variety of laws and regulations and other materials from the literature.

The results of this research are: 1) A citizen who legally married to foreigners, where the citizen obtains asset of Land under Hak, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Up Unit Flats above HGB land, whether due to inheritance, transfer of rights through purchase, donation or will, then he is obliged to relinquish his rights within a period of one year from obtaining such rights (article 21 paragraph (3) of Law No. 5 of 1960 on Regulation basic Agrarian or BAL). 2) A marriage takes legal effect to the parties that did include the relationship of husband and wife, of wealth, and of the position of the child, so it is with mixed marriages. As for the legal consequences of intermarriage among others, relating to citizenship spouse, child citizenship, and property in marriage.

Keywords: Legal protection, land tenure, marital depending citizenship